

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rendahnya literasi keuangan menjadi salah satu pokok permasalahan utama dalam meningkatkan inklusi keuangan yang berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Kurangnya literasi keuangan menjadi salah satu tantangan yang cukup besar dalam mencapai inklusi keuangan yang menyeluruh dan berkelanjutan, terutama di negara berkembang seperti Indonesia ini. Literasi keuangan yang rendah menghalangi individu untuk memahami dan memanfaatkan produk dan juga layanan keuangan secara optimal. Namun, meskipun saat ini layanan keuangan telah berkembang pesat, masih banyak individu terutama yang berada pada kalangan kelompok berpendapatan rendah, tidak mempunyai pengetahuan dasar yang memadai untuk mengakses dan memanfaatkan layanan tersebut dengan bijak. Fenomena ini semakin diperparah oleh kurangnya pendidikan keuangan yang menyentuh lapisan masyarakat paling bawah, yang mengakibatkan mereka tetap terjebak dalam kondisi finansial yang rentan dan tidak stabil.

Otoritas Jasa Keuangan tahun 2024 kembali menyelenggarakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) untuk mengukur indeks literasi dan inklusi keuangan penduduk Indonesia sebagai landasan program peningkatan literasi dan inklusi keuangan ke depan. Hasil SNLIK tahun 2024 menunjukkan indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43%, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%. SNLIK tahun 2024 juga

mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah. Hasil yang diperoleh menunjukkan indeks literasi keuangan syariah penduduk Indonesia sebesar 39,11%. Adapun, indeks inklusi keuangan syariah sebesar 12,88%.²

Dengan melihat kenyataan tersebut, jelas bahwa pengembangan literasi keuangan sangat penting untuk mencapai inklusi keuangan yang lebih baik. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara akses terhadap layanan keuangan dan pemahaman masyarakat mengenai produk dan risiko yang terkait. Ketidakpahaman ini menyebabkan banyak individu terjebak dalam praktik pinjaman online ilegal dan investasi bodong, karena mereka tidak dapat membedakan antara layanan keuangan yang legal dan ilegal. Selain itu, literasi keuangan yang rendah juga berkontribusi pada tingginya angka kasus penipuan, di mana masyarakat cenderung tidak memahami syarat dan ketentuan dari produk keuangan yang mereka gunakan.

Literasi keuangan dan inklusi keuangan sangat penting dalam meningkatkan jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Literasi dan inklusi keuangan merupakan hal yang sangat penting karena diharapkan masyarakat secara umum ataupun UMKM memiliki pengetahuan dan dapat mengambil keputusan terhadap layanan jasa keuangan yang tepat dan dapat menerima pelayanan yang baik pada jasa layanan keuangan.³ UMKM merupakan sektor yang berperan penting dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. UMKM menjadi

² Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024” dalam <https://www.ojk.go.id/>, diakses 25 Desember 2024

³ Mesra surya Ariefin, Sri Bulkia, and Mesra Berlyn Hakim, ‘Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Inklusi Keuangan Dengan Pelatihan Keuangan Sebagai Variabel Moderasi Pada UKM’, *Media Komunikasi Ilmu Ekonomi*, 40.1 (2023), pp. 1–12, doi:10.58906/melati.v40i1.93.

pilihan banyak masyarakat karena pengelolaan usahanya sederhana, membutuhkan modal yang relatif kecil, dan fleksibel dalam pengoperasiannya. Peran utama yang terlibat dari keberadaan UMKM adalah kemampuan meminimalisir pengangguran. Selain itu, UMKM dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga dapat meningkatkan taraf hidup yang artinya dapat meminimalisir tingkat kemiskinan.⁴ Menurut Pasal 33 ayat 4 UUD 1945, UMKM merupakan sektor perekonomian nasional yang mandiri dengan potensi yang sangat besar untuk memajukan kesejahteraan rakyat.⁵

Meskipun pertumbuhan UMKM terus meningkat, namun disamping itu masih banyak hambatan yang dialami oleh pelaku UMKM. Perkembangan UMKM terhambat oleh beberapa masalah seperti keterbatasan modal, pemanfaatan informasi dan teknologi yang Kredit Usaha Rakyat (KUR) ang baik.⁶ Dalam perekonomian Indonesia UMKM memiliki kontribusi yang sangat signifikan, namun untuk mengelola bisnis UMKM juga tidaklah mudah. Masalah krusial yang dihadapi oleh para UMKM yakni sulitnya untuk mengakses sumber permodalan. Permasalahan ini sering kali terletak pada spesifikasi persyaratan pengajuan kredit yang diberlakukan oleh lembaga keuangan. Banyak UMKM yang tidak memenuhi kriteria kelayakan yang ditetapkan oleh perbankan, seperti tidak adanya laporan keuangan yang rapi,

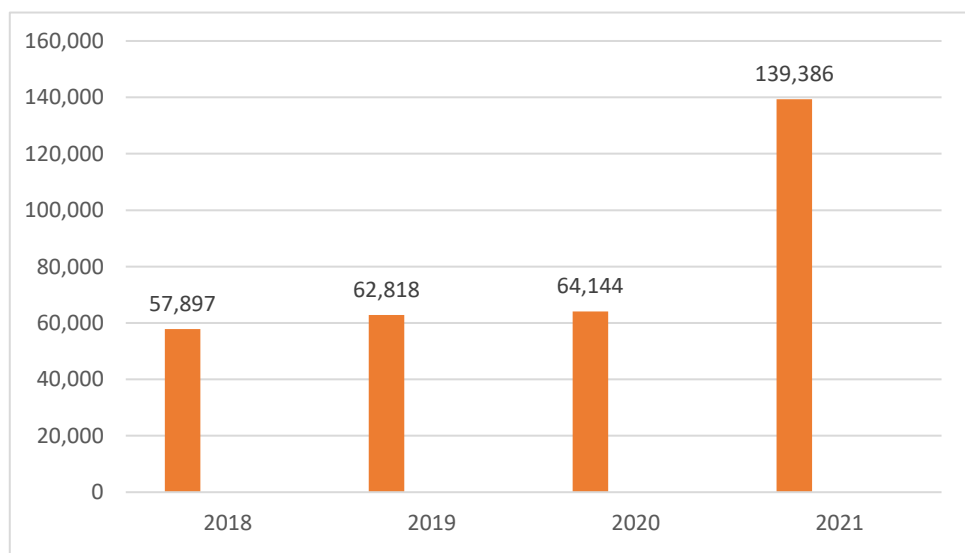
⁴ Eka Nur Widyarningsih and Heri Widodo, 'Meningkatkan Kinerja UMKM: Dampak Dari Inklusi Keuangan Dan Literasi Keuangan', *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi Dan Masyarakat*, 1.2 (2024), p. 17, doi:10.47134/jpem.v1i2.256.

⁵ Erin Soleha, Erina Rulianti, and Fiqih Maria, 'Sosialisasi Pemberdayaan Umkm "Umkm Bangkit Bersinergi"', *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1.1 (2022), pp. 1–7, doi:10.30640/abdimas45.v1i1.165.

⁶ Widyarningsih and Widodo, 'Meningkatkan Kinerja UMKM: Dampak Dari Inklusi Keuangan Dan Literasi Keuangan'. Hal. 2

status legalitas usaha yang belum lengkap, atau jaminan aset yang tidak mencukupi. Kondisi ini semakin diperburuk oleh rendahnya literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM, sehingga mereka kurang memahami prosedur pengajuan kredit dan strategi pengelolaan keuangan yang efektif. Akibat dari terbatasnya akses ke permodalan ini, pertumbuhan dan pengembangan UMKM menjadi terhambat.

Tabel 1. 1 Pertumbuhan UMKM Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 s.d 2021



Sumber: <https://tulungagungkab.bps.go.id/>

Berdasarkan tabel 1.1 pada tahun 2018 jumlah UMKM sebanyak 57.897, kemudian pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan sampai pada 62.818 UMKM, selanjutnya pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan pertumbuhan yakni mencapai 64.144, kemudian pertumbuhan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2021 pada masa pandemi Covid-19 yakni sampai pada angka 139.389 UMKM. Jadi, dapat disimpulkan perkembangan UMKM

pada Kabupaten Tulungagung selalu mengalami peningkatan pada setiap tahunnya.

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang tugas pokoknya mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya dari masyarakat kepada masyarakat, selain itu bank juga memberikan jasa-jasa keuangan, pembayaran pembiayaan lainnya kepada masyarakat atas adanya bank-bank berusaha semaksimal mungkin melakukan dana tarik (insentif) ekonomi berupa bunga tinggi, bonus serta hadiah-hadiah yang menarik. Berbagai langkah dilakukan bank dengan tujuan menghimpun dana Masyarakat.⁷ Industri perbankan sering dianggap sebagai jantungnya dan motor penggerak perekonomian suatu negara. Sebagaimana terlihat dan strategisnya peran perbankan dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat bagi pembiayaan kegiatan sektor perekonomian sehingga akan memperkuat struktur perekonomian suatu negara.⁸

Perbankan dapat memberikan daya dukung terhadap terciptanya stabilitas sistem keuangan dan sistem perekonomian masyarakat. Dukungan ini berupa program yang bernama Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dilakukan melalui unit - unit yang tersebar di masing - masing daerah guna mempermudah masyarakat dalam proses administrasi serta agar lebih efektif dan efisien waktu. Selain itu, dengan adanya unit di masing masing

⁷ www.btn.co.id diakses pada 4 September 2024

⁸ Windy Mahrani, 'Peranan Perbankan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia', *Jurnal Al Wadiah*, 1.2 (2023), pp. 164–77, doi:10.62214/jaw.v1i2.138.

daerah bertujuan agar program ini dapat merata ke seluruh daerah termasuk daerah terpencil sekali pun.

Selama masa pandemi Covid-19 sangat terasa dampak bagi UMKM karena penurunan daya beli masyarakat disebabkan ada himbuan dari pemerintah agar masyarakat bekerja dari rumah sehingga masyarakat membeli kebutuhan tanpa tatap muka dengan penjual atau melalui online. Dengan fenomena tersebut, tentu mengganggu keberlangsungan UMKM bahkan bisa bangkrut dan menutup usahanya, dan tidak hanya itu juga banyak pula karyawan – karyawan yang harus terkena PHK sebagai dampak dari pandemi Covid-19.⁹ Akibat dari adanya masa pandemi Covid-19 ini menyebabkan perekonomian masyarakat Indonesia semakin memburuk. Namun, penggalakan penyebaran program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk membantu memajukan usaha-usaha Masyarakat justru malah dilakukan oleh pemerintah. Alasan pemerintah melakukan penggalakan tersebut yakni untuk memulihkan perekonomian akibat krisis pandemi Covid-19. Pemerintah mulai menggalakkan peningkatan target Kredit Usaha Rakyat (KUR) selama masa pandemi Covid-19 dengan menyalurkan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut ke bank – bank pemerintah.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) kembali mencatatkan kinerja positif di tahun 2024. Belum sampai akhir tahun, penyaluran KUR Tahun 2024 berhasil melampaui target yang ditetapkan dengan penyaluran di sektor produksi

⁹ Moh. Ubaidillah, 'Menjaga Keberlangsungan Umkm Pada Masa Wabah Covid-19', *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 4.2 (2020), p. 166, doi:10.25273/inventory.v4i2.7674.

mendominasi. Realisasi penyaluran KUR hingga 23 Desember 2024 mencapai Rp280,28 triliun, atau 100,10% dari target tahun 2024. Angka ini tumbuh sebesar 7,8% (yoy) dan disalurkan kepada 4,92 juta debitur. Komposisi penyaluran KUR didominasi oleh sektor produksi yang mencapai 57,8% dari total penyaluran, menunjukkan keberhasilan KUR dalam mendorong pertumbuhan sektor riil dan UMKM. Meskipun dihadapkan pada tantangan ekonomi global maupun domestik, kualitas penyaluran KUR tetap terjaga dan ditunjukkan melalui tingkat *Non-Performance Loan* (NPL) KUR sebesar 2,19% terjaga di bawah NPL nasional sebesar 2,21%. Peningkatan kualitas penyaluran KUR juga ditunjukkan melalui jumlah total debitur baru KUR per 31 Oktober 2024 mencapai 2,52 juta debitur atau 107,65% dari target debitur baru KUR tahun 2024 paling sedikit 2,34 juta debitur.

Hal tersebut dilihat juga dari peningkatan akses pembiayaan, debitur KUR yang bergraduasi di tahun 2024 mencapai lebih dari 1,30 juta debitur atau 111,24% dari target debitur graduasi KUR yang telah ditetapkan paling sedikit 1,17 juta debitur.¹⁰ Dapat disimpulkan dengan melihat kenyataan tersebut, jelas bahwa pertumbuhan peningkatan kualitas penyaluran KUR dapat dilihat melalui meningkatnya jumlah debitur yang melakukan pengajuan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dengan meningkatnya pertumbuhan penyaluran KUR menunjukkan bahwa keberhasilan KUR dalam mendorong pertumbuhan sektor riil dan UMKM bernilai positif.

¹⁰ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Resmi! Target KUR 2025 Naik Menjadi Rp300 Triliun”, dalam <https://www.ekon.go.id/>, diakses 27 Januari 2023

Peran perbankan dalam pendampingan dan pemenuhan modal kerja UMKM diharapkan mampu mengembangkan usaha sehingga secara tidak langsung perbankan membantu meningkatkan pendapatan riil dan ekonomi Indonesia.¹¹ Dalam upaya memenuhi target Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diberikan oleh pemerintah, maka perbankan harus berusaha keras memasarkan produknya pada usaha – usaha masyarakat. Namun, juga tidak jarang masyarakat yang memiliki usaha menolak untuk melakukan pinjaman pada perbankan. Adanya penolakan tersebut dapat berasal dari beberapa komponen seperti pemberian informasi dan pendekatan komunikasi yang perlu diperhatikan lebih jauh lagi dalam penawaran kredit yang dilakukan oleh bagian pemasaran perbankan. Pendekatan komunikasi sangatlah penting dimiliki oleh bagian pemasaran karena melalui pendekatan komunikasi tersebut dapat menarik perhatian serta mempengaruhi minat calon nasabah dalam mengambil keputusan.

Dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) , pemberian informasi serta pendekatan komunikasi dapat mempengaruhi kenyamanan calon nasabah seperti adanya rasa khawatir terhadap pinjamannya, dimana calon nasabah merasa takut tidak sanggup mengembalikan dana yang dipinjamnya sehingga banyak yang mengurungkan niatnya untuk meminjam dana. Faktor-faktor itulah yang akan menjadi tantangan bagi perbankan untuk lebih antusias dalam meyakinkan dan menarik minat calon nasabah terhadap pinjaman yang

¹¹ Egig Islamida Putri and Nanik Kustiningsih, 'Peranan Perbankan Syariah Terhadap Ekonomi Melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Umkm Pada Bank Syariah Indonesia', *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3.1 (2022), pp. 395–405, doi:10.46306/rev.v3i1.107.

ditawarkan. Untuk memenuhi target pencapaian yang diberikan oleh pemerintah maka perusahaan perlu menetapkan strategi pemasaran yang tepat agar pencapaiannya tetap konsisten atau tidak mengalami penurunan karena mengingat besarnya target. Adanya strategi yang baik menjadi alat yang sangat berperan agar pemasaran dapat dilakukan secara efektif dan efisien dimana dalam susunannya membutuhkan rancangan yang komprehensif atau integral guna mengetahui urutan-urutan yang sistematis dalam penerapannya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang lebih dalam mengenai bagaimana peran KUR terhadap UMKM tersebut, maka dari itu penulis mengambil judul **”Peran Program Pembiayaan Berbasis Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dalam Meningkatkan Produktifitas Dan Inklusi Keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Halal Di Tulungagung.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan program pembiayaan KUR dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) halal di Tulungagung?
2. Bagaimana program pembiayaan berbasis KUR berperan terhadap peningkatan produktivitas (UMKM) halal di Tulungagung?
3. Bagaimana program pembiayaan berbasis KUR dalam meningkatkan inklusi keuangan (UMKM) halal di Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah tersebut, maka adapun tujuan dilakukan penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis pelaksanaan program pembiayaan KUR dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) halal di Tulungagung
2. Untuk menganalisis peran program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam meningkatkan produktivitas (UMKM) halal di Tulungagung
3. Untuk menganalisis dampak program KUR dalam meningkatkan inklusi keuangan (UMKM) halal di Tulungagung

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu memberikan manfaat dan kegunaan secara aspek teoritis dan aspek praktis.

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan wawasan keahaman mengenai inklusi keuangan atas peran program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

2. Aspek Praktis

a. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menciptakan ide-ide penelitian baru, dan penelitian ini dijadikan acuan atau referensi terkait dengan pembaruan penelitian selanjutnya.

b. Bagi Masyarakat Pemilik UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai wawasan dan keilmuan tambahan mengenai acuan dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi para pemilik usaha yang masih memiliki modal kecil untuk mengembangkan usaha.

c. Bagi Perbankan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi terkait dengan langkah-langkah yang harus dipersiapkan Bank dalam menyediakan produk pinjaman untuk memenuhi kebutuhan modal kerja nasabah.

E. Ruang Lingkup Dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Penelitian Ruang lingkup penelitian merupakan suatu batasan yang memudahkan untuk dilaksanakannya suatu penelitian agar lebih efektif dan efisien untuk memisahkan aspek tertentu sebuah objek. Ruang lingkup dan batasan masalah yang diberikan dalam penelitian bertujuan untuk menghindari adanya pembahasan yang meluas dari tema studi ini. Adapun ruang lingkup masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dibatasi pada peran program pembiayaan berbasis Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam meningkatkan produktivitas dan inklusi keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) halal di Tulungagung. Ruang lingkup penelitian mencakup dampaknya terhadap pelaku UMKM halal dalam aspek peningkatan kapasitas produksi, pengelolaan keuangan, serta akses terhadap fasilitas produk keuangan lainnya.

2. Keterbatasan Penelitian

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan lebih fokus, mendalam, dan sempurna maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu adanya pembatasan penelitian. Batasan masalah yang diterapkan meliputi beberapa aspek utama. Pertama, penelitian ini hanya akan meneliti UMKM halal di wilayah Tulungagung yang telah mendapatkan fasilitas pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga UMKM yang belum menerima pembiayaan KUR tidak termasuk dalam lingkup penelitian. Kedua, penelitian ini tidak akan membahas aspek teknis dari sistem keuangan perbankan, melainkan lebih menitikberatkan pada pengalaman dan persepsi pelaku UMKM dalam memanfaatkan fasilitas KUR. Dengan adanya batasan ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan analisis yang lebih spesifik dan memberikan rekomendasi yang sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.

F. Penegasan Istilah

Agar sejak awal para pembaca dapat secara jelas memperoleh kesamaan pemahaman mengenai konsep yang terkandung dalam judul “Peran Program Pembiayaan Berbasis Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dalam Meningkatkan Produktifitas dan Inklusi Keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Halal Di Tulungagung”, sehingga diantara pembaca tidak ada yang memberikan makna yang berbeda pada judul ini. Untuk itu peneliti perlu memaparkan penegasan istilah baik secara konseptual maupun secara operasional sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

a. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

KUR merupakan fasilitas pinjaman bersubsidi yang menasar pelaku usaha mikro dan kecil. Skala bisnis debitur KUR juga beragam. Ada yang benar-benar mikro, hingga yang sudah cukup besar. Menilik beragamnya skala bisnis tersebut, lembaga penyalur KUR pun juga menerapkan batasan nilai pinjaman kepada debitur dengan mempertimbangkan kondisi bisnisnya.¹² KUR merupakan program yang dicanangkan pemerintah namun sumber dananya sepenuhnya berasal dari dana perbankan.¹³

b. Produktivitas UMKM Halal

Produktivitas adalah pengukuran secara menyeluruh dari jumlah dan kualitas barang atau jasa yang dihasilkan pekerja atau mesin dan bahan baku atau sumber daya sebagai inputannya. Produktivitas menghubungkan hasil atau keluaran dengan kuantitas masukan sehingga mendapatkan produk yang diinginkan.¹⁴ Produktivitas UMKM merujuk pada kemampuan suatu usaha dalam meningkatkan output atau hasil produksi dengan penggunaan sumber daya yang efisien.

¹² Permata Wulandari Rofikoh Rokhim, Iin Mayasari, *Kredit Usaha Rakyat Tinjauan Kebijakan & Implementasi*, ed. by Bambang P. Jatmiko (UI Publishing, 2020).

¹³ Sry Lestari, 'The Effect of Provision Kur on The Development of UMKM in Padangsidimpuan', *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 9.2 (2021), pp. 316–29.

¹⁴ Andung Jati Nugroho, *Tinjauan Produktivitas Dari Sudut Pandang Ergonomi* (PACE, 2021).

UMKM halal itu berarti produknya dari mulai hulu hingga hilir diperhatikan. Artinya dari bahan baku, proses sampai ke pengemasan atau penyajian itu memang sesuai dengan ketentuan halal.¹⁵

Jadi produktivitas UMKM halal merupakan ingkat efisiensi dan efektivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak dalam sektor ekonomi halal dalam menghasilkan output (barang atau jasa) dengan optimal, sesuai dengan prinsip syariah.

c. Inklusi Keuangan Syariah

Inklusi keuangan syariah adalah indikator penting yang berorientasi kepada keadilan dan pemerataan bagi masyarakat umum. Dalam perspektif Islam pihak pemerintah berkewajiban untuk melakukan pemerataan ekonomi dan menghindari kesenjangan pendapatan dan implikasinya kepada tingkat kesejahteraan yang bertujuan pada kestabilan perekonomian di Indonesia.¹⁶

d. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas penyediaan sejumlah dana oleh bank syariah dalam memenuhi kebutuhan nasabahnya.¹⁷ Menurut Danupranata pembiayaan adalah pemberian fasilitas

¹⁵ Lukmanul Hakim, 'Potensi UMKM Dalam Membangun Perekonomian Yang Terdampak Pandemi', *INSIGHT: Islamic Economy Bulletin*, 2021, hal. 1-47.

¹⁶ Santi Arafah and others, 'Edukasi Peran Inklusi Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Masyarakat', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3.2 (2023), p. 2023.

¹⁷ M.E.I Dr. Ahmadiono, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, ed. by M.E Mahmudah, S.Ag. (IAIN Jember Press, 2021).

penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang tergolong mengalami kekurangan dana, pembiayaan produktif adalah jenis pembiayaan untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi, sedangkan pembiayaan konsumtif adalah digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan saat dipakai untuk memenuhi kebutuhan.¹⁸

2. Secara Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud dari “Peran Program Pembiayaan Berbasis Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dalam Meningkatkan Produktifitas Dan Inklusi Keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Halal Di Tulungagung” adalah program Kredit Usaha Rakyat (KUR) berperan penting dalam meningkatkan produktifitas dan inklusi keuangan bagi UMKM dengan memberikan akses yang lebih mudah terhadap sumber pembiayaan, sehingga membantu mereka memenuhi kebutuhan modal untuk operasional dan pengembangan usaha.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan penelitian proposal ini bertujuan untuk memudahkan dalam memperoleh data mengenai hal-hal yang akan dibahas disini. adapun yang menjadi penulisan Penelitian Skripsi adalah:

¹⁸ Nurhadi Nurhadi, ‘Pembiayaan Dan Kredit Di Lembaga Keuangan’, *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance*, 1.2 (2018), pp. 14–24, doi:10.25299/jtb.2018.vol1(2).2804.

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, dan Sistematika Penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian teori tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR), Produktivitas UMKM Halal, Inklusi Keuangan Syariah, dan Pembiayaan, serta penelitian terdahulu dan kerangka konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi pendekatan penelitian dan teori, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data, Teknik pengecekan keabsahan data, dan tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum latar penelitian dan temuan penelitian yang dilakukan oleh penulis dan serta menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas mengenai kesimpulan yang merupakan penyajian singkat dari hasil penelitian yang diperoleh

pembahasan, serta saran yang diberikan kepada peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti hal yang sama.